



**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
TAHUN 2017 - 2018**

**PEMERINTAH KOTA JAMBI**

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. Jend. Basuki Rahmad, Kotabaru, Jambi, Telp. 0741-444953

Website: [www.diskominfo.jambikota.go.id](http://www.diskominfo.jambikota.go.id)

Email: [diskominfo@jambikota.go.id](mailto:diskominfo@jambikota.go.id)



**PEMERINTAH KOTA JAMBI**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

JL. JEND. BASUKI RACHMAT KOTA BARU JAMBI

TELP./FAX. (0741) 444953

Website : <http://www.diskominfo.jambikota.go.id>

E-Mail : [diskominfo@kotajambi.go.id](mailto:diskominfo@kotajambi.go.id)

---

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA JAMBI**

**NOMOR :      TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA JAMBI**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA JAMBI,**

- Menimbang :** a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi.

- Mengingat :** 1. Undang – undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20 );
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 244 Tambahan Lembaran

- Negara Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4614 );
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tetang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
  8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M/PAN/11/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  14. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Jambi tahun 2014 Nomor 8);
  15. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2017 Nomor 14).

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan,

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi untuk menetapkan rencana kinerja jangka menengah dan tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi Tahun 2017-2018;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Jambi;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jambi  
Pada tanggal : 31 Januari 2017

PLT. KEPALA DINAS  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KOTA JAMBI



**NOVIARDI, S. Kom.**  
Pembina  
NIP. 19681114 200012 1 001

**Indikator Kinerja Utama (IKU)  
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi  
Tahun 2017-2018**

1. **INSTANSI** : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi.
2. **VISI** : Terselenggaranya jaringan komunikasi dan informatika yang terintegrasi untuk mendukung terwujudnya Kota Jambi Smart City.
3. **MISI** :
  1. Mewujudkan jaringan komunikasi dan informatika yang terintegrasi;
  2. Mewujudkan pelayanan informasi dan komunikasi yang efektif dan handal;
  3. Mewujudkan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi menuju Kota Jambi Smart City;
  4. Mewujudkan pelayanan persandian untuk pengamanan informasi milik pemerintah Kota Jambi;
  5. Mewujudkan pelayanan data statistik sektoral secara modern;
  6. Melaksanakan urusan rumah tangga untuk mendukung peningkatan kapasitas organisasi dan pengembangan sumber daya manusia yang handal.
4. **TUJUAN** :
  1. Meningkatkan kualitas pelayanan komunikasi dan informatika;
  2. Meningkatkan penyebarluasan informasi dan komunikasi;
  3. Meningkatkan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi Kota Jambi Smart City;
  4. Meningkatkan pengelolaan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah Kota Jambi;
  5. Mengoptimalkan pelayanan data statistik sektoral dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
  6. Meningkatkan fungsi pelayanan administrasi pemerintahan yang optimal dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi;
  7. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Jambi.
5. **TUGAS** : Membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika,

bidang persandian, dan bidang statistik.

6. **FUNGSI** :
1. Penyusunan program dan anggaran;
  2. Pengelolaan keuangann;
  3. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara;
  4. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah kota, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar *data center*, *disaster recovery center* & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data dan informasi *e-Government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan *government chief information officer (GCIO)* pemerintah kota, penyelenggaraan ekosistem TIK *SmartCity*, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan pemerintah kota, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kota, pengembangan sumber daya TIK pemerintah kota dan masyarakat, pengawasan dan pengendalian TIK, mengkoordinasi pelaksanaan survei bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM, memverifikasi kompilasi produk administrasi bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM, mendiseminasi dan memberikan pelayanan data statistik, layanan keamanan informasi *egovernment*, pengelolaan sumber daya persandian dan keamanan informasi dilingkungan pemerintah kota, pengelolaan dan pengamanan informasi dan komunikasi sandi antar perangkat daerah, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian dan keamanan informasi dilingkungan pemerintah kota;
  5. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah kota, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar *data center*, *disaster recovery center* & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data dan informasi *e-Government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan *government chief information officer (GCIO)* pemerintah kota, penyelenggaraan ekosistem

TIK *SmartCity*, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan pemerintah kota, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kota, pengembangan sumber daya TIK pemerintah kota dan masyarakat, pengawasan dan pengendalian TIK, mengkoordinasi pelaksanaan survei bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM, memverifikasi kompilasi produk administrasi bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM, mendiseminasi dan memberikan pelayanan data statistik, layanan keamanan informasi egovernment, pengelolaan sumber daya persandian dan keamanan informasi dilingkungan pemerintah kota, pengelolaan dan pengamanan informasi dan komunikasi sandi antar perangkat daerah, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian dan keamanan informasi dilingkungan pemerintah kota;

6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah kota, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar *data center*, *disaster recovery center* & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data dan informasi *e-Government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan *government chief information officer (GCIO)* pemerintah kota, penyelenggaraan ekosistem TIK *SmartCity*, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan pemerintah kota, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kota, pengembangan sumber daya TIK pemerintah kota dan masyarakat, pengawasan dan pengendalian TIK, mengkoordinasi pelaksanaan survei bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM, memverifikasi kompilasi produk administrasi bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM, mendiseminasi dan memberikan pelayanan data statistik, layanan keamanan informasi egovernment, pengelolaan sumber daya persandian dan keamanan informasi dilingkungan pemerintah kota, pengelolaan dan pengamanan informasi dan komunikasi sandi antar perangkat daerah, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian dan keamanan informasi dilingkungan pemerintah kota;
7. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan dinas komunikasi dan informatika; dan
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Indikator Kinerja Utama (IKU)**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

NO	KINERJA UTAMA	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatkan cakupan infrastruktur jaringan TIK, dan sistem informasi terintegrasi	1.	Rasio Jumlah OPD Yang tercakup infrastruktur jaringan TIK	<p>Jumlah OPD yang tercover pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur TIK ----- x 100%</p> <p>Jumlah OPD</p> <p><b>Penjelasan:</b> Jumlah OPD Yang terkoneksi jaringan Pemkot Jambi dalam penyelenggaraan pemerintahan</p>	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi  (Bidang APTIKA)	1. Laporan hasil Optimalisasi dan pengembangan jaringan Teknologi informasi
		2.	Persentase peningkatan Data Center, NOC, dan sistem terintegrasi	<p>Jumlah Sistem Informasi yang tercover NOC dan Data Center ----- x 100%</p> <p>Jumlah Sistem Informasi yang ada</p> <p><b>Penjelasan:</b> Jumlah Sistem informasi yang terlayani NOC dan Data Center (Keamanan Jaringan, Aplikasi dan Data)</p>	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi  (Bidang APTIKA)	2. Laporan hasil pengembangan infrastruktur NOC, <i>Data Center</i> dan Teknologi informasi

		3.	<p>Persentase peningkatan sistem aplikasi informatika yang terintegrasi</p> <p><b>Penjelasan:</b> Jumlah aplikasi e-gov yang terintegrasi</p>	<p>Jumlah aplikasi yang terintegrasi Tahun (n) - Jumlah aplikasi yang terintegrasi (tahun n-1) ----- x 100% Jumlah aplikasi yang terintegrasi Tahun n-1</p>	<p>Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi (Bidang APTIKA)</p>	<p>3. Laporan hasil Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi terintegrasi</p>
2.	<p>Meningkatkan informasi dan KIM berbasis IT, dan eksistensi PPID</p>	1.	<p>Rasio Jumlah informasi, KIM berbasis IT, dan eksistensi PPID</p> <p><b>Penjelasan:</b> Meningkatnya jumlah KIM berbasis IT, website KIM yang selalu terupdate dan pembinaan KIM serta update berita website Pemkot Jambi dan Website Diskominfo, serta website PPID, media sosial milik Pemkot Jambi dan Diskominfo</p>	<p>Jumlah Informasi dan KIM berbasis IT ----- x 100% Jumlah KIM</p> <p>Jumlah informasi yang diupload di website Pemkot Jambi ----- x 100% Jumlah informasi yang seharusnya</p> <p>Jumlah informasi yang diupload di Website Diskominfo ----- x 100% Jumlah informasi yang seharusnya</p> <p>Jumlah informasi yang diupload di media sosial Pemkot Jambi dan Diskominfo ----- x 100% Jumlah informasi yang seharusnya</p>	<p>Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi (Bidang IKP)</p>	<p>1. Laporan pembinaan dan pengembangan KIM berbasis IT, dan PPID</p>

		2.	Rasio jumlah PPID Perangkat Daerah yang sesuai regulasi  <b>Penjelasan:</b> Pemutakhiran SK PPID, DIP, Desk PPID SKPD	Jumlah PPID Perangkat Daerah yang sesuai regulasi ----- x 100% Jumlah PPID Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi (Bidang IKP)	2. Laporan pelaksanaan kegiatan peningkatan eksistensi PPID
		3.	Rasio tindak lanjut pengaduan dan aspirasi masyarakat  <b>Penjelasan:</b> Jumlah pengaduan yang sudah dilaporkan ke SKPD terkait dan sudah tertangani	Jumlah pengaduan yang telah ditindaklanjuti ----- x 100% Jumlah pengaduan yang masuk	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi (Bidang IKP)	3. Laporan tindak lanjut pengaduan dan aspirasi masyarakat
		4.	Rasio jumlah data dan statistik sektoral  <b>Penjelasan:</b> Jumlah data/informasi yang seharusnya diupload ke website Pemkot Jambi dan Portal Open Data Kota Jambi serta jumlah data statistik sektoral	Jumlah data yang diupload di Website Pemkot Jambi dan Portal Open Data Kota Jambi ----- x 100% Jumlah data yang seharusnya  Jumlah data Statistik Sektoral yang ada ----- x 100% Jumlah data Statistik Sektoral yang seharusnya	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi (Bidang Tata Kelola TIK dan Statistik)	4. Laporan hasil Pengumpulan Data dan Informasi Daerah serta pengelolaan statistik sektoral

3.	Meningkatkan pelayanan persandian dalam rangka pengamanan informasi	1. Persentase OPD yang terfasilitasi layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah  <b>Penjelasan:</b> Jumlah informasi milik pemerintah yang seharusnya sudah diamankan	Jumlah informasi milik pemerintah atau negara yang diamankan ----- x 100% Jumlah informasi yang diterima dan dikirimkan	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi  (Persandian dan Keamanan Informasi)	1. Laporan hasil pengaman informasi milik pemerintah
----	---	---	---	--	--

Jambi, 31 Januari 2017  
PLT. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA JAMBI



**NOVIARDI. S. Kom**

Pembina

NIP. 19681114 200012 1 001